

## UPAYA MALAYSIA DALAM MENGATASI KRISIS AIR MELALUI RENEGOSIASI PERJANJIAN JUAL-BELI AIR TAHUN 2018-2021

Siti Nur Azizah Rukmana<sup>1</sup>

### *Abstract*

*The water crisis that occurred in Malaysia in 2014 caused water shortages in various regions. This makes the Malaysian government have to make various efforts at home and abroad to overcome this. Meanwhile, Malaysia's foreign efforts are to renegotiate water prices in a bilateral water sale and purchase agreement with Singapore, where Johor and Singapore have a water sale and purchase agreement with Singapore until 2061. renegotiating the water purchase agreement with Singapore are holding various bilateral meetings between Malaysia and Singapore where it is noted that these efforts began in 2000 until 2021, where in 2019 Singapore agreed to increase the water purchase with Malaysia, it's just that the two countries have not fully agreed on the new water price. Both Singapore and Malaysia are well aware of the importance of each other, and are constantly looking for ways and means to improve relations between the two countries.*

**Keywords:** *Crisis, Water, Malaysia, Singapore, Renegotiation*

### **Pendahuluan**

Pada 1961, Singapura dan Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama yaitu perjanjian jual beli air antara SCC (*Singapore City Council*) dengan Sultan Johor yang menyatakan Singapura berhak mengkonsumsi 86 juta galon sehari dari Pontian dan Gunung Pulai, Tebrau dan Sungai Skudai yang dikenakan harga tiga sen (0,03 RM) per 1.000 galon. Sementara itu, Johor akan membayar Singapura 50 sen (RM0.50) untuk setiap 1.000 galon air yang diolah. Lalu kesepakatan kedua, yang melibatkan daerah sungai Johor ditandatangani pada tahun 1962 akan berakhir pada tahun 2061. Perjanjian ini menyatakan Singapura berhak mengambil 250 juta galon per hari dari Sungai Johor dengan harga yang sama. Kedua perjanjian pasokan ini juga dicatat dalam *Separation Act 1965* antara Singapura dan Malaysia (Padzil, 2007:55). Perjanjian yang telah disepakati bersama hingga tahun 2061 ini, diusulkan untuk direvisi kembali oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2018 (Schrek,2018). hal ini disebabkan oleh terjadinya kekurangan air di berbagai wilayah Malaysia sejak tahun 2012 dan memasuki level krisis pada tahun 2014.

Pada 1989, Falkenmark memperkenalkan indikator tekanan air yang menyatakan tingkat kelangkaan air atau krisis air di wilayah tertentu sebagai jumlah air tawar terbarukan yang tersedia untuk setiap orang setiap tahun. Ini akhirnya dikenal sebagai Indikator Falkenmark, dan indikator ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur dan menggambarkan ketersediaan air untuk penggunaan manusia. Tingkat krisis air di suatu negara ditentukan berdasarkan ambang batas: Jika jumlah air terbarukan di suatu negara di bawah 1.700 m<sup>3</sup> per orang untuk setiap tahunnya, negara tersebut dikatakan mengalami stres air; di bawah 1.000 m<sup>3</sup> dikatakan mengalami krisis air; dan di bawah 500 m<sup>3</sup>, krisis air mutlak (Falkerman, 1989:48).

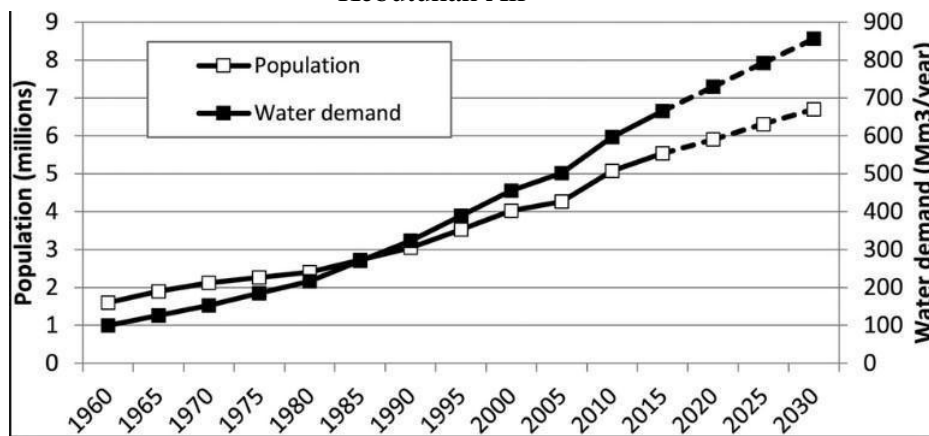
Sedangkan menurut data *Department of Environment Malaysia* jumlah persediaan air pada tahun 2014 hanya mencapai 1000-500 m<sup>3</sup> per orang. Hal ini menunjukkan Malaysia mengalami krisis air yang berbahaya (DOE Report, 2014).

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: azima.usmaniy@gmail.com

Sedangkan menurut data *Department of Environment Malaysia* jumlah persediaan air pada tahun 2014 hanya mencapai 1000-500 m<sup>3</sup> per orang. Hal ini menunjukkan Malaysia mengalami krisis air yang berbahaya (DOE Report, 2014).

Persediaan air bersih suatu daerah dikatakan normal apabila margin atau batas air mencapai 15 hingga 20%. Dan pada tahun 2015-2016, Kedah dan Selangor memiliki 0% persediaan penyimpanan air bersih, dengan total daya tampung (*Design Capacity*) masing- masing 1,308 untuk Kedah dan 4,606 untuk Selangor. Level air di sungai dan waduk menurun hingga mencapai level kritis di Selangor. Provinsi dengan populasi terbesar Malaysia yang berbatasan dengan Kuala Lumpur ini mengalami Penurunan level air dan ikut mengurangi pasokan ke pabrik pengolahan air di Kuala Lumpur, berakibat pada pembagian air bagi warga (DOE Report, 2014). Adapun untuk Johor sendiri presentase persediaan air pada tahun 2015 adalah 18,5% dan menurun spada tahun 2016 mencapai 16,4%.Persediaan air di Johor juga patut menjadi perhatian Pemerintah Malaysia karena minimnya air di Johor berpotensi menyebabkan masalah diplomatik dengan negara Singapura. Singapura memiliki ketergantungan air yang besar terhadap Malaysia. Sekitar hampir setengah dari total keseluruhan konsumsi harian air di Singapura dipenuhi oleh Malaysia, sedangkan setengahnya lagi berasal dari kolam penampungan air domestik (Padzil, 2007). Sementara itu untuk Singapura sendiri, negara dengan jumlah populasi mencapai 5,612 juta (Singapore Statistic Report, 2018). ini memiliki sumber air yang tergolong sedikit untuk memenuhi kebutuhan harian penduduknya, kondisi ini diikuti oleh tingginya tingkat konsumsi dan kebutuhan Singapura akan sumber air. Selain, angka pertumbuhan populasi yang terus meningkat hal ini juga diikuti oleh perkembangan ekonomi Singapura yang membutuhkan jumlah air yang banyak.

Tabel 1 Tingkat Populasi Singapura dan Kebutuhan Air



Sumber: *Population and Water Demand in Singapore 2018*

Untuk memenuhi kebutuhan air Singapura melakukan kerjasama jual-beli air dengan Malaysia dan dalam proses kerjasama dengan Singapura, terjadi krisis air di beberapa bagian negara Malaysia. Krisis ini diperburuk dengan kewajiban Malaysia menjual air ke Singapura. Dalam menghadapi krisis air tersebut Malaysia melakukan berbagai upaya untuk mencukupi kebutuhan air dalam negerinya, salah satunya adalah melakukan re- negosiasi perjanjian jual beli air bersih dengan Singapura.

## **Landasan Konseptual Konsep Negosiasi**

Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan (Anna, 2017:25). Sementara menurut Robbins dalam buku *Organizational Behavior*: “negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut (Anna, 2017:25). Negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara (Roy, 1995:31).

Berikut adalah proses komunikasi dari negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Ketiga, kedua belah pihak menjalin kerja sama. Keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak. Kelima, Untuk mengkonkritkan masalah yang masih abstrak (Rezka, 2016:19).

Negosiasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa internasional, negosiasi merupakan sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan- perselisihan, negosiasi juga merupakan cara untuk mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan tersebut. Alasan utama di dalam menggunakan cara negosiasi adalah para pihak yang bersengketa dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa nya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensi dari para pihak (Mangku,2010:22). Negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara bersengketa bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ke tiga. Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang digunakan di dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Adapun untuk prosesnya negosiasi terbilang memakan proses yang lama, hal ini terutama dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul, selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa nya melalui negosiasi (Mangku,2010:22).

Adapun tujuan negosiasi adalah untuk mencapai penambahan perjanjian baru dalam kesepakatan lama dengan pertimbangan baru. Hal ini merujuk pada perkembangan baru yang belum dicantumkan dalam perjanjian lama. Karena perjanjian yang lama sudah tidak relevan lagi, maka perlu dilakukan pembaruan dalam perjanjian agar tetap relevan dengan kondisi terkini pada negara masing-masing.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan mengenai upaya Malaysia dalam mengatasi krisis air di Malaysia melalui perundingan perjanjian jual beli air dengan Singapura. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil telaah pustaka digital (online library research), baik dari buku, jurnal, laporan, dokumen, dan sumber-sumber internet yang berisi data dan informasi yang relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## Hasil dan Pembahasan

Tahun 1950, Singapura mendapat pengakuan sebagai sebuah kota, hal ini membuat MPS berubah menjadi Dewan Kota Singapura (SCC). SCC telah melanjutkan penelitiannya dengan mendirikan Public Utilities Board (PUB) untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pasokan air di Singapura. Singapura melakukan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan airnya. Selain sumber air lokal dan air impor dari Johor. Dengan luas wilayah hanya 720 kilometer persegi, Singapura mengalami kelangkaan air bukan karena kurangnya curah hujan, yang rata-rata 2.300 milimeter per tahun, tetapi karena terbatasnya lahan tempat menyimpan air dan tidak adanya akuifer (Tortajada, 2017:20).

Negosiasi berlanjut sampai pembentukan Malaysia diresmikan. Pada 1961 Johor dan Singapura sekali lagi ditandatangani pasokan air untuk secara resmi menggantikan Perjanjian 1927 (Padzil, 2007:58). Perjanjian pasokan air ini baru dibuat dikategorikan ke dalam dua perjanjian terpisah. Perjanjian pertama ditandatangani pada tahun 1961 Perjanjian Gunung Pulai berakhir pada 2011. Perjanjian air adalah 1961 mengatakan Singapura memiliki hak untuk mengonsumsi 86 juta galon per hari (mg) dari Pontian dan Gunung Pulai, Tebrau dan Sungai Skudai. Dan untuk perjanjian kedua, yang melibatkan daerah tangkapan Sungai Johor ditandatangani pada tahun 1962 akan berakhir pada tahun 2061.

Pada tahun 1990, PUB dan pemerintah Negara Bagian Johor menandatangani perjanjian untuk membangun Waduk Linggiu untuk meningkatkan hasil Sungai Johor untuk memungkinkan abstraksi yang dapat diandalkan dari hak penuh PUB untuk 250 juta galon air per hari. Perjanjian ini melengkapi Perjanjian Air 1962. Waduk Linggiu merupakan waduk pengatur. Selama periode cuaca kering atau air pasang, lebih banyak air laut mengalir di sepanjang Sungai Johor. Air hujan yang terkumpul di Waduk Linggiu dilepaskan ke Sungai Johor, menambah alirannya atau mendorong air laut kembali, memungkinkan pengambilan air baku yang andal dari Sungai Johor (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2021). Perjanjian yang telah disepakati bersama hingga tahun 2061 ini, diusulkan untuk direvisi kembali oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2018, hal ini disebabkan oleh terjadinya kekurangan air di berbagai wilayah Malaysia sejak tahun 2012 dan memasuki level krisis pada tahun 2014. Krisis air ini mempengaruhi 1,3 juta rumah tangga diluar dari sektor industri dan bisnis di Malaysia. Karena krisis ini, pemerintah Malaysia melakukan pengurangan air kepada masyarakat sebesar 20% dari kebutuhan (DOE Report, 2014). Di Malaysia jumlah populasi penduduk mencapai 32,4 juta dengan kadar pertumbuhan 1,1% pertahun (DOS Report, 2018).

Sedangkan untuk total konsumsi air pada dasarnya dibagi menjadi sektor domestik 17%, sektor Industri 21%, dan sektor pertanian 62%. Namun, hampir 2/3 air olahan dikonsumsi oleh sektor domestik/ rumah tangga. Hal ini terutama karena industri dan kegiatan pertanian menarik air langsung dari alam untuk penggunaannya. Permintaan air secara keseluruhan tumbuh pada tingkat 4 persen per tahun, dan diproyeksikan menjadi sekitar 20 miliar m<sup>3</sup> pada tahun 2020 (Abdullah, 2002:41).

Adapun krisis air ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pengelolaan air yang tidak efisien dan pengembangan yang tidak berkelanjutan juga salah satu penyebab terganggunya suplai air karena terjadinya pencemaran air permukaan (Abdullah, 2002:44).

Ada dua jenis sumber pencemaran air yaitu, penyebab tetap dan penyebab tidak tetap. Penyebab tetap adalah sumber yang dapat diidentifikasi penyebabnya seperti, pembuangan limbah dari pabrik dan pabrik pengolahan. Sementara itu, penyebab yang tidak tetap adalah sumber yang tidak dapat diidentifikasi dari mana asalnya. Misalnya, air aliran yang terkontaminasi dari kegiatan pertanian atau penebangan.

Bahan-bahan yang terkontaminasi dari penyebab tidak tetap sangat sulit untuk dikendalikan karena terbawa oleh air hujan dari daerah yang berbeda. Berikut adalah berbagai penyebab pencemaran air yang pertama, adalah limbah. Pembuangan limbah yang tidak efisien memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga manusia karena dapat menyebabkan penyakit ditularkan melalui air, seperti diare. Yang kedua, adalah pupuk kimia. Pupuk kimia dari kegiatan pertanian dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ganggang atau plankton di dalam air karena konsentrasi nitrogen dan fosfor yang tinggi. Pertumbuhan ganggang sangat berbahaya karena mereka menggunakan oksigen dari air dan menyebabkan kematian kehidupan akuatik karena jumlah oksigen yang terbatas. Yang ketiga adalah sisa bahan kimia. Bahan kimia seperti bahan logam (nikel, kadmium, merkuri, timbal dan arsenik) dan PCBs (Polychlorinated biphenyls) adalah salah satu contoh limbah beracun berbahaya (Penting, 2016).

Bahan limbah ini biasanya berasal dari pabrik dan industri yang menghasilkan produk elektronik berupa AC, motor listrik, dan berbagai barang elektro magnetik lainnya. Bahan kimia beracun ini memiliki umur panjang dan sulit untuk diolah kembali. Menurut laporan *Development of Environment Malaysia*, Faktor yang menyebabkan krisis air bersih adalah sampah, sekitar 300,000 ton sampah dibuang ke sungai setiap tahunnya. Selain sampah plastik, sampah elektronik berupa kulkas, kasur dan peralatan dapur juga turut di buang ke sungai. 25 sungai telah diidentifikasi sebagai daerah yang mengalami tekanan air (Abdul Rahman, 2008:6).

Penyebab lain adalah sungai. Malaysia adalah negara dengan letak geografis yang terdiri dari dua bagian yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung (Peninsula) Malaysia serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak yang dialiri oleh 150 sistem sungai. Sekitar 100 di antaranya berada di Semenanjung Malaysia dan 50 di Sabah dan Sarawak Malaysia Timur. Di dalam sistem sungai ini diperkirakan ada 1.800 sungai dan anak-anak sungai utama, dengan panjang total melebihi 38.000 km (Abdullah, 2002:44).

Sungai terbesar di Malaysia adalah Sungai Rajang dengan luas daerah tangkapan 51.000 km persegi sedangkan di Semenanjung adalah Sungai Pahang dengan daerah tangkapan air seluas 29.000 km persegi. Sungai adalah sumber utama pasokan air di Malaysia, menyumbang sekitar 97% dari total penggunaan. Dengan curah hujan tahunan rata-rata 3.000 mm, negara ini kaya akan sumber daya air, dan diperkirakan 566 miliar m<sup>3</sup> air mengalir ke sistem sungai setiap tahun (Abdullah, 2002:39). tercemarnya sungai adalah sebagian besar pestisida dan pupuk yang digunakan dalam pertanian, saluran pembuangan meluap dan minyak lemak dari jalan, akhirnya mengalir ke sistem air dan mencemari sungai-sungai. Sumber lain berasal dari pupuk rumput, hewan peliharaan dan kotoran hewan ternak, serta bahan tanaman yang membusuk.

Pada Maret 2019 dilaporkan bahwa salah satu Sungai Kim-Kim yang terletak di Johor mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh gas metana, hal ini menyebabkan 111 sekolah yang berada di kawasan sungai tersebut ditutup untuk sementara, dan 2.775 orang dirawat di rumah sakit (Kementerian Kesehatan Malaysia, 2019).

Akibat dari krisis air yang terjadi di Malaysia, permintaan pemenuhan kebutuhan air oleh masyarakat Malaysia menjadi meningkat dan diperlukan penanganan yang tepat oleh pemerintah untuk menangani dan menyediakan sumber daya air yang layak untuk masyarakatnya. Dan untuk memenuhi supply air ke Singapura serta mengurangi kerugian akibat krisis air dibutuhkan upaya dari pemerintah Malaysia untuk melakukan renegosiasi perjanjian air dengan Singapura untuk mencapai kesepakatan baru terkait perubahan harga air yang tertera di perjanjian.



### Proses Negosiasi Bilateral Malaysia-Singapura

Adapun tujuan negosiasi adalah untuk mencapai penambahan perjanjian baru dalam kesepakatan lama dengan pertimbangan baru. Hal ini merujuk pada perkembangan baru yang belum dicantumkan dalam perjanjian lama. Karena perjanjian yang lama sudah tidak relevan lagi, maka perlu dilakukan pembaruan dalam perjanjian agar tetap relevan dengan kondisi terkini pada negara masing-masing. Hal ini merujuk pada kembalinya Mahathir sebagai perdana menteri menyusul kemenangannya dalam pemilihan umum 2018. Pada 2019, Malaysia menyatakan keinginannya agar Singapura bekerja sama dalam merevisi harga air dari perjanjian air tahun 1962 karena fakta bahwa daerah cadangan air di negara bagian Johor telah turun menjadi 4 persen dan berada di jalur untuk mencapai nol pada tahun 2020 (DOE Report, 2021).

Adapun tujuan utama pemerintah Malaysia dalam upaya re-negosiasi perjanjian jual-beli air dengan Singapura yaitu:

- a. Kapasitas air di wilayah Malaysia yang terus berkurang akibat penyedotan dalam skala besar, hal ini diikuti pencemaran sungai di berbagai wilayah Malaysia yang menyebabkan krisis air. Pemerintah Malaysia mulai menyadari supply air di Negara tersebut mulai terbatas.
- b. Inflasi, menurut pemerintah Malaysia harga jual-beli air pada tahun 1961 sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Untuk mencapai tujuan utama tersebut pemerintah Malaysia melakukan berbagai negosiasi bilateral dengan Singapura. Negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara bersengketa bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ke tiga. Adapun bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung itu merujuk pada dialog terkait perjanjian air ini telah dimulai pada akhir tahun 2000, ketika Mahathir Mohammad menjadi perdana menteri Malaysia. Di bawah Mahathir, Malaysia meminta agar harga air baku dinaikkan menjadi 45 sen per 1.000 galon (Ministry of Foreign Affair Singapore, 2002).

Pada tanggal 15 Agustus tahun 2000, Mahathir bertemu dengan mendiang Lee Kuan Yew dan keduanya sepakat bahwa Singapura akan membayar 45 sen per 1.000 galon. Menurut Malaysia, tinjauan harga diperlukan mengingat hampir empat dekade inflasi dan untuk membenarkan bagian yang adil dari harga air. Namun, pada awal 2001, Malaysia menyarankan agar harga dinaikkan lebih lanjut menjadi 60 sen per 1.000 galon. Lalu 21 Februari 2001, Dr Mahathir mengatakan kepada Lee bahwa Johor percaya bahwa "harga yang adil" untuk air baku adalah 60 sen per mgd dan harga ini "harus ditinjau setiap lima tahun" (Ministry of Foreign Affair Singapore, 2002).

Singapura membantah bahwa kenaikan harga tersebut hanya mungkin terjadi setelah 2011. Malaysia tetap bersikukuh. Pada Maret 2002, Malaysia berencana untuk membebaskan biaya kepada Singapura 60 sen per 1.000 galon terlepas dari kesepakatannya. Malaysia juga mengatakan harga akan ditetapkan pada 3 ringgit Malaysia dari tahun 2007 hingga 2011, setelah itu disarankan agar disesuaikan naik setiap tahun untuk inflasi (Wahab, 2021).

Pemerintah Malaysia dan Singapura bertukar surat dan siaran pers resmi yang menyatakan posisi mereka hingga 14 Agustus 2002, ketika pemerintah negara bagian Johor secara resmi mengirimkan pemberitahuan bahwa mereka sedang meninjau harga air. PUB Singapura kemudian menjawab bahwa mereka berhak untuk menegosiasikan "paket harga yang dapat diterima bersama" antara kedua pemerintah.

Pada bulan September 2002, Malaysia mempresentasikan formula harganya ke Singapura sementara Singapura mempertahankan posisinya bahwa penawaran

Malaysia tidak dapat diterima. Singapura menyatakan bahwa hak Malaysia atas tinjauan harga berdasarkan perjanjian 1962 telah berakhir karena ketentuan tinjauan 25 tahun yang terkandung dalam perjanjian telah berlalu. Singapura menyatakan bahwa Malaysia hanya dapat meninjau harga air pada tahun 1986 dan 1987, yang masing-masing menandai 25 tahun sejak perjanjian 1961 dan 1962, tetapi tidak melakukannya (Wahab, 2021).

Sebenarnya, ketentuan 25 tahun yang tertulis di perjanjian diartikan berbeda oleh kedua belah pihak. Klausul 14 Perjanjian 1962 menyatakan bahwa:

*“Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) dari klausa sebelumnya dari hadiah-hadiah ini akan ditinjau kembali setelah lewatnya waktu dua puluh lima tahun sejak tanggal hadiah-hadiah ini dan akan ditinjau kembali oleh para pihak dan fakta-fakta yang akan diperhitungkan dalam peninjauan tersebut akan mencakup antara lain setiap kenaikan atau penurunan daya beli...”*(Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2002).

Malaysia menafsirkan frasa "setelah berakhirnya dua puluh lima tahun" secara harfiah, yang akan memungkinkan Malaysia untuk meninjau harga air setiap saat setelah ulang tahun ke-25 perjanjian tersebut.

Pada tahun 2002, Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong mengatakan kepada Parlemen bahwa setiap pelanggaran perjanjian air akan merusak keberadaan Singapura, karena penyediaan pasokan air dijamin dalam Perjanjian Pemisahan tahun 1965 (Wahab, 2021).

Selanjutnya pada tahun 2003 Mahathir turun dari jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan digantikan oleh Tun Abdullah Badawi.

Pada tahun 2011, Singapura mengembalikan hak mereka atas akses air di Gn. Pulai Malaysia sebagai pertanda berakhirnya perjanjian jual-beli air pada tahun 1961 dengan Singapura. Singapura diwakili oleh ketua PUB Tan Gee Paw, dan Obet Tawil sebagai perwakilan Johor, menandatangani dokumen-dokumen untuk menyerahkan bangunan air Gunung Pulai dan Skudai serta fasilitas pendukung di Pontian dan Tebrau kepada pemerintah Negara Bagian Johor pada tanggal 31 Agustus 2011. Fasilitas ini diserahkan dalam keadaan baik. Singapura juga menyatakan bahwa berakhirnya kesepakatan tersebut tidak akan mempengaruhi kecukupan pasokan air Singapura. Berdasarkan Perjanjian Air 1962, Singapura terus menerima 250 juta galon air baku per hari dari Sungai Johor. Sebagai imbalannya, Singapura berkewajiban untuk menyediakan pasokan harian air olahan ke Malaysia hingga 2% (atau 5 mgd) dari air yang dipasok ke Singapura.

Selanjutnya pada Januari tahun 2018, dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menegaskan kembali pentingnya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pasokan air yang andal dan memadai dari sungai johor sebagaimana diatur dalam perjanjian air tahun 1962. Lalu pada Mei tahun 2018 Mahathir kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan menyatakan akan merevisi kembali harga air pada perjanjian jual-beli air antara Malaysia dan Singapura, dalam pernyataannya pihak Malaysia akan membawa masalah ini ke mahkamah internasional apabila tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan dengan Singapura.

Menanggapi pernyataan tersebut Singapura melalui Menteri Luar Negeri, Dr. Vivian Balakrishnan mengkritik keras agenda tersebut dan menyatakan pernyataan tersebut hanya upaya pemerintah Malaysia untuk membangkitkan opini publik. Upaya Malaysia dalam proses renegotiasi perundingan

harga air dengan Singapura di mulai pada Februari tahun 2019, Malaysia dan Singapura melalui Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, menyatakan

bahwa Singapura dan Malaysia sudah memasuki tahap awal perundingan dan negosiasi harga air. Dalam dua pertemuan bilateral kedua negara, Singapura setuju untuk membayar 45 sen untuk setiap 1.000 galon hingga 2011 dan 60 sen dari 2011 hingga 2061. Pemerintah Malaysia memberlakukan syarat bahwa Singapura harus membayar 60 sen dari 2001 hingga 2007 dan RM3 hingga 2011, tetapi negara itu menolak (Pasu, 2019).

Pihak Singapura juga menyatakan kepada Malaysia bahwa setiap peninjauan harga air baku yang dijual ke Singapura juga berarti peninjauan harga air olahan yang dijual ke Johor. Menurut Singapura kedua belah pihak juga harus mendiskusikan hasil dan kualitas air dari Sungai Johor, untuk memastikan bahwa Singapura dapat terus memperoleh hak atas 250 mgd air baku berdasarkan Perjanjian Air 1962, selama 40 tahun tersisa dari tahun-tahun mendatang yang tertera pada Perjanjian Air 1962.

Pertemuan selanjutnya berupa kunjungan diplomatik pada Februari 2020 melalui Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Marzuki Yahya dilaporkan telah mengatakan bahwa negosiasi ulang Perjanjian Air Sungai Johor 1962 antara pemerintah Malaysia dan Singapura untuk tahap kedua sekarang berlangsung dalam suasana yang positif dan meyakinkan. Pemerintah Malaysia memastikan proses negosiasi renegotiasi harga air melalui kesepakatan berjalan lancar, delegasi Singapura yang dipimpin Menteri Luar Negeri Dr Vivian Balakrishnan, datang ke Malaysia untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah untuk melanjutkan pembicaraan (Noh, 2020).

Lalu pada Agustus 2021 Mahathir menyatakan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia dan digantikan oleh Muhyiddin Yassin. Pada September 2021 karena situasi COVID-19 kedua negara, Malaysia dan Singapura menyatakan bahwa pembicaraan air akan dilanjutkan setelah situasi COVID-19 di kedua negara membaik. Persoalan air yang tertunda ini bisa menggunakan pendekatan yang baik untuk menyelesaikan masalah bilateral. win-win solution adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kedua negara tersebut. hal ini bisa dicapai jika kedua belah pihak bersedia menerima kenyataan bahwa kunci untuk memecahkan masalah bilateral adalah kesediaan mereka untuk berkompromi. Kesadaran kedua negara untuk berkompromi adalah kunci untuk menuju hubungan yang lebih baik.

Walaupun harga baru dalam perjanjian jual-beli air belum disepakati sepenuhnya oleh kedua negara, upaya yang dilakukan Malaysia dalam mengatasi krisis air melalui renegotiasi perjanjian jual-beli air dengan Singapura belum efektif menangani krisis air yang terjadi di Malaysia. Diperlukan upaya-upaya konkrit berupa penanganan langsung di dalam negerinya. Bagi Malaysia, menyelesaikan masalah tinjauan harga air yang sudah berlangsung lama adalah prioritas, dalam hal ini berbagai upaya dalam negeri juga dilakukan oleh Malaysia yaitu mempromosikan kesadaran politik di sektor air, memobilisasi media massa/LSM atas kesadaran air, dan lain-lain.

## **Kesimpulan**

Krisis air yang dialami Malaysia pada tahun 2014 membuat Malaysia harus melakukan berbagai upaya untuk menangani krisis tersebut, hal ini diperburuk dengan kewajiban Malaysia untuk memenuhi perjanjian jual beli air dengan Singapura hingga tahun 2061. Oleh karena itu pemerintah Malaysia berniat menaikkan harga air yang telah disepakati Singapura melalui renegotiasi. Upaya Malaysia dalam proses renegotiasi perundingan harga air dengan Singapura di mulai pada Februari tahun 2019. Dalam dua pertemuan bilateral kedua negara, Singapura setuju untuk membayar 45 sen untuk setiap 1.000 galon hingga 2011 dan 60 sen dari tahun 2011 hingga 2061. Lalu pertemuan selanjutnya berupa kunjungan diplomatik pada Februari 2020, delegasi Singapura yang dipimpin Menteri Luar Negeri Dr Vivian Balakrishnan,



datang ke Malaysia untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah untuk melanjutkan pembicaraan. Walaupun harga baru dalam perjanjian jual-beli air belum disepakati sepenuhnya oleh kedua negara, upaya yang dilakukan Malaysia dalam mengatasi krisis air melalui renegotiasi perjanjian jual-beli air dengan Singapura belum efektif menangani krisis air yang terjadi di Malaysia. Diperlukan upaya-upaya konkrit berupa penanganan langsung di dalam negerinya.

Melalui diplomasi yang baik, yaitu dengan dialog bilateral dan pertemuan-pertemuan bilateral yang dilangsungkan kedua negara. Menemukan solusi damai melalui negosiasi langsung atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase penting bagi kedua negara dalam menyelesaikan masalah air dan menghilangkan hambatan yang terus-menerus dalam hubungan bilateral.

## Referensi

- Abdullah, Keizrul. 2002. *Integrated river basin management*. In Chan Ngai Weng (Ed.), *River: towards sustainable development*. Universiti Sains Malaysia Publisher: Penang. 3-14.
- Abdurrahman, Haliza. *Water Shortage in Malaysia again?*. Universitas Putra Malaysia, Selangor- hal. 5-6
- Zainal, Anna. Agustina. 2017. *Buku Ajar: Teknik Lobi dan Negosiasi*. Aura. Bandar Lampung. In Press.
- DOE, Malaysia Environmental Quality Report 2014. Department of Environment, Malaysia; Ministry of Natural Resources and Environment (NRE) tersedia di <http://www.doe.gov.my/> 2014.
- DOS, Malaysia Statistic Report 2018. Departement Of Statistics, Malaysia; siaran akbar anggaran penduduk semasa Malaysia 2017-2018 tersedia di [www.dosm.gov.my](http://www.dosm.gov.my)
- Falkenmark, Malin; Lundqvist, Jan; Widstrand, Carl .1989. "Macro-scale water scarcity requires micro-scale approaches". *Natural Resources Forum*. tersedia di <https://onlinelibrary.wiley.com>
- Kementerian Kesehatan Malaysia. 2019 artikel dapat diakses di [moh.gov.my/index.php/pages/view](http://moh.gov.my/index.php/pages/view)
- Ministry of Foreign Affair Singapore, Water Agreement. <https://www.mfa.gov.sg>
- Mangku, Dewa. G. Sudika. 2010 . "Pelanggaran Terhadap Kekebalan Diplomatik Studi Kasus: Penyadapan Kedutaan Besar RI di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961" Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja tersedia di <https://core.ac.uk/>
- Maulana, Rezka. Roza. 2016 . " Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dengan Kemampuan Negosiasi Pada Entrepreneur Muda di Kawasan Kampus UIN" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. tersedia di <http://repository.uin-suska.ac.id>
- Noh, Mohammed Farid "Perjanjian dengan Singapura dalam Perincian" artikel dapat diakses pada [www.hmetro.my](http://www.hmetro.my)
- Padzil, Ruhana. 2007. "An Analysis on Johor-Singapore Water Issue: Supply and Demand". *University Of Malaya Jurnal* tersedia di <http://repository.um.edu.my>
- Pasu, Kubang "Rundingan Air Dengan Singapura" artikel dapat diakses di [www.bharian.com.my/berita/nasional](http://www.bharian.com.my/berita/nasional)
- Penting, 2016 *Water and Energy consumer association of Malaysia* [konsumerkini.net.my/medialib/index.php/important-magazine](http://konsumerkini.net.my/medialib/index.php/important-magazine)

- Schrek. Adam. 2018.” Malaysia eyes more than 10-fold hike in Singapore waterdeal” tersedia di <https://apnews.com/>
- Singapore, statistic report 2018 tersedia di <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/reference/sif2018.pdf>
- Tortajada, Cecilia & Joost Buurman.2017.” Water Policy in Singapore” tersedia di [global-is-asian.nus.edu.sg/index.php](http://global-is-asian.nus.edu.sg/index.php)
- Wahab,Jumrah “The 1962 Johor-Singapore Water Agreement”  
Jurnal dapat diakses di [thediplomat.com](http://thediplomat.com)